



INTISARI

SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Hanoch Adi Anggono Joshua Istia¹ dan Dani Krisnawati²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan putusan hakim dalam menerapkan sanksi tindakan kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak serta untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan sanksi kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder diperkuat oleh data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Sifat dari penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif dan bentuk penelitian ini adalah penelitian preskriptif.

Hasil penelitian ini meliputi: Pertama, pertimbangan putusan hakim dalam menerapkan sanksi tindakan kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada putusan yang penulis analisis menunjukkan bahwa penerapan sanksi kebiru kimia memiliki kelemahan yakni hakim dalam menerapkan hukumnya tidak berdasarkan pada hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terjadi, hakim hanya mendasarkan pada unsur-unsur pasal dari tuntutan jaksa penuntut umum telah terpenuhi tanpa mempertimbangkan untuk memastikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum bagi terdakwa. Kedua, kesesuaian penerapan sanksi tindakan kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dianggap melanggar hak seseorang untuk tidak disiksa, dan penghukuman yang tidak manusiawi, karena hanya menimbulkan penderitaan tanpa adanya pemulihan diri pelaku. Keputusan dan eksekusi penerapan sanksi dilakukan berdasarkan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang. Perlindungan hukum terhadap HAM harus tetap menjadi prioritas utama.

Kata Kunci: Sanksi Tindakan, Kebiru Kimia, Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,

² Dosen Pembimbing Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



ABSTRACT

ACTION SANCTION CHEMICAL CASTRATION FOR PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN

Hanoch Adi Anggono Joshua Istia¹ dan Dani Krisnawati²

This research aims to determine and analyze the considerations of the judge's decision in applying sanctions for chemical castration for perpetrators of sexual violence against children and to determine and analyze the suitability of applying chemical castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children in terms of the aspect of human rights.

This research is a type of normative legal research. The data used in this research is secondary data using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Secondary data is strengthened by primary data obtained from interviews with sources. The nature of this research is descriptive research and the form of this research is prescriptive research.

This results of the analysis of this research include: First, consideration of the judge's decision in applying sanctions for chemical castration for perpetrators of sexual violence against children shows that the application of chemical castration sanctions has a weakness, namely that the judge in applying the law is not based on the applicable law and the facts that occurred, the judge only based the article elements of the public prosecutor's demands have been fulfilled without considering ensuring certainly, justice, and legal benefits for the defendant. Second, the appropriateness of applying sanctions for chemical castration for perpetrators of sexual violence against children viewed from the aspect of human rights, can be considered to violate a person's right not to be tortured, and is an inhumane punishment, because it only causes suffering without any recovery for the perpetrator. Decisions and execution of sanctions implementation are carried out based on laws that are fair and not arbitrary. Legal protection of human rights must remain a top priority.

Keywords: Action Sanction, Chemical Castration, Sexual Violence Against Children.

¹ Student of the Law Masters Study Program, Faculty of Law, Gadjah Mada University

² Supervisor of the Criminal Law Department, Faculty of Law, Gadjah Mada University